

DANANG DESAK INSTANSI TERKAIT IKUT MEMBANTU Petani dan UMKM Jangan Dipersulit Dapatkan Solar

SLEMAN (KR) - Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa meminta dinas terkait untuk mempermudah memberikan surat rekomendasi kepada para petani dan pelaku UMKM sesuai dengan tugas dan fungsinya agar bisa mendapatkan solar di SPBU.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden No.191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021.

"Kita harus membantu para petani dan UMKM kita, jangan sampai mempersulit mereka. Mengingat mereka adalah penyangga ketahanan pangan kita dan agar nantinya mereka dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di masa pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19," ujar Danang kepada wartawan, Rabu (18/5), terkait sosialisasi Surat

Edaran Bupati Sleman Nomor 542-/00124 tertanggal 28 April 2022 tentang pembelian BBM jenis bio solar bagi petani dan UMKM di Ruang Sembada Kantor Setda Sleman. Sosialisasi dihadiri sejumlah OPD di lingkungan Pemkab Sleman, Hiswana Migas Yogyakarta, Perwakilan SPBU Kabupaten Sleman dan UPTD BP4 wilayah I sampai VIII.

Dalam sosialisasi tersebut, Danang menyampaikan awal mula pentingnya Surat Edaran tersebut berangkat dari seringnya mendapatkan keluhan dari petani terkait sulitnya pembelian BBM jenis bio solar di SPBU menggunakan jeriken.

"Banyak sekali masukan dan keluhan dari petani selama saya mendampingi petani dan UMKM di Sleman. Makanya sangat penting Surat Edaran ini untuk membantu mereka dan mohon untuk menjadi perhatian kita semua," tegasnya.

Sementara perwakilan PT Pertamina Cabang Yogyakarta William Handoko Gotama selaku Sales Branch Manager menyampaikan, dengan adanya Surat Edaran ini tentu sangat membantu dalam pendistribusian BBM jenis solar kepada masyarakat.

"Sebelumnya mungkin kita masih simpang siur terkait surat rekomendasi, kita berterimakasih dengan adanya Surat Edaran ini. Akhirnya kita bisa mengetahui kejelasan surat rekomendasi dari dinas terkait," ucapnya, seraya memastikan akan menjalankan Surat Edaran ini di setiap SPBU di Kabupaten Sleman. (Has)-f

Sleman Raih Anugerah Kearsipan 2022

SLEMAN (KR) - Pemkab Sleman kembali menorehkan prestasi. Kali ini, Pemkab Sleman menerima penghargaan dalam Anugerah Kearsipan Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) bersama Kementerian Pendeayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi (PANRB) di Grand Ballroom Hotel Pangeran Pekanbaru Riau, Rabu (18/5).



KR-Istimewa
Bupati memperlihatkan penghargaan yang diterimanya.

Penghargaan diserahkan secara langsung oleh Menteri PANRB Tjahjo Kumolo kepada Bupati Sleman Kustini. Dalam kegiatan yang dihadiri oleh kementerian, lembaga negara serta Gubernur, Bupati/Walikota seluruh Indonesia ini, disam-

paikan bahwa Kabupaten Sleman mendapat penghargaan peringkat kedua Pengawasan Kearsipan Tahun 2021 dengan nilai 90.66 (Sangat Memuaskan).

Bupati Kustini Sri Purnomo usai menerima penghargaan tersebut mengatakan, prestasi yang diraih Kabupaten Sleman dinilai sebagai wujud nyata upaya Pemkab Sleman dalam memberikan kontribusi untuk kemajuan bangsa dan negara. "Penghargaan ini (Anugerah Kearsipan) dapat menjadi motivasi untuk terus bersama sama, bersinergi dalam mewujudkan pengelolaan kearsipan yang andal dan akurat untuk kemajuan bangsa dan negara," katanya. (Has)-f

REKONSTRUKSI PASAL 17 UU KIP Mafia Pertanahan Bisa Diselesaikan



KR-Istimewa

Riyanta

SLEMAN (KR) - Anggota Komisi II DPR RI Riyanta mengungkapkan, sampai saat ini masih banyak sekali permintaan untuk mengadvokasi masyarakat yang menjadi korban kejahatan pertanahan.

Informasi tersebut didapatnya dari LSM Gerakan Jalan Lurus (GJL) juga dari LSM Gerakan Anti Mafia Tanah (Gamat) yang aktif mengadvokasi masyarakat yang membutuhkan pemecahan atas masalah pertanahan.

"Ada hal yang sangat substantif ketika kita berbicara mengenai kejahatan pertanahan atau mafia tanah. Hemat saya, itu dapat diselesaikan dengan merekonstruksikan lagi pasal 17 Undang-Undang 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)," ujar Riyanta kepada wartawan di Sleman, Rabu (18/5).

Menurut politisi PDI Perjuangan ini, pasal 17 UU 14 Tahun 2008 menjelaskan bahwa dokumen warkah atau dokumen yang menjadi dasar penerbitan sertipikat tanah itu menjadi dokumen yang dikecualikan atau dianggap bukan dokumen publik.

Dalam ketentuannya, dokumen warkah itu yang memilikinya hanya pemilik sertipikat.

"Hal tersebut akan menjadi persoalan ketika dokumen warkah yang dijadikan dasar oleh pemohon sertipikat ternyata palsu atau dipalsukan. Semestinya warga negara yang lebih berhak secara hukum, oleh undang-undang diberikan suatu ruang untuk melihat dokumen warkah. Namun, di sisi lain pihak yang memperoleh sertipikat dengan cara ilegal, terkesan dilindungi oleh hukum," tandas Riyanta.

Oleh karena itu, menurut Riyanta, pasal 17 UU 14 Tahun 2008 harus dikonstruksikan kembali dengan merevisinya.

(Has)-f

Negiya Express Hadir di SCH

SLEMAN (KR) - Negiya Express, salah satu rumah makan yang menyediakan menu makanan Jepang hadir di Sleman City Hall (SCH), Rabu (18/5). Ini menjadi cabang yang kelima di Indonesia, setelah sebelumnya membuka tiga cabang di Jakarta dan satu cabang di Surabaya.

Negiya Express hadir di Indonesia sejak 2005 dengan menu andalan Meny Gyutandon atau lidah sapi khas Australia. Negiya berasal dari kaya 'Negi' berarti daun bawang dan 'Ya' berarti rumah. "Jadi kita menghadirkan menu rumahan yang familiar di lidah masyarakat. Negiya Express asalnya di Australia dan sangat familiar di sana," kata Andreas Setyawan, Area Manager Negiya Express Jakarta.

Yogyakarta sebagai dipilih menjadi lokasi yang kelima, mengingat bisnis kuliner di sini sangat bagus. Dan berdasarkan survei, ternyata menu Jepang belum banyak di Yogyakarta. "Kita hadir untuk memberikan alternatif pilihan bagi masyarakat. Tentu saja dengan harga yang ramah di kantong masyarakat Yogyakarta," jelasnya.

(Awh)-f



KR-Atiek Widyastuti H

Suasana Negiya Express di SCH.



TMMD Kolaborasi Pemerintah Tanggulangki Kemiskinan

VISI Pemkab Sleman Tahun 2021-2026 adalah Terwujudnya Sleman Sebagai Rumah Bersama Yang Cerdas, Sejahtera, Berdaya Saing, Menghargai Perbedaan dan Memiliki Jiwa Gotong Royong. Untuk mencapai visi tersebut tentu saja Pemkab Sleman harus bekerjasama dengan seluruh stakeholder yang ada, termasuk dengan dukungan penuh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Tujuan pembentukan Forkopimda berdasarkan PP 12 Tahun 2022 tentang Forkopimda, adalah untuk mendukung pelaksanaan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di daerah, peningkatan keselarasan langkah dan tindakan dalam pelaksanaan penyelesaian permasalahan di daerah; penyelesaian berbagai permasalahan, pemeliharaan stabilitas sosial politik dan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri di daerah.

Seperti kita ketahui bersama bahwa selama masa pandemi Covid-19, perekonomian di Kabupaten Sleman juga ikut terpuruk. Akibatnya di tahun 2021 persentase angka kemiskinan meningkat 0,52 persen. Angka kemiskinan di tahun 2020 sebesar 8,12 persen meningkat menjadi 8,64 persen di tahun 2021. Untuk dapat memulihkan kondisi masyarakat dan menekan angka kemiskinan ini, maka Pemkab Sleman selalu berupaya dan bekerja keras untuk melakukan pembangunan daerah.

Pembangunan daerah untuk mengentaskan kemiskinan, menjadi tanggung jawab bersama semua stakeholder. Pemkab Sleman secara khusus juga bekerjasama dengan unsur teritori militer wilayah yaitu Komando Distrik Militer (KODIM) 072 Sleman.

Salah satunya melalui kegiatan TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD). Kegiatan TMMD ini juga merupakan wujud aktualisasi nyata Dharma Bhakti TNI kepada rakyat. Selain sebagai wahana untuk memantapkan Kemanunggalan TNI dengan Rakyat, TMMD merupakan bentuk kolaborasi nyata antara Pemkab Sleman dengan TNI, khususnya Kodim 0732 Sleman.



KR-Istimewa

Danang Maharsa

Hal ini diperlukan untuk dapat meningkatkan kualitas maupun kuantitas kegiatan. Termasuk penentuan sasaran, pembagian tugas, beban, maupun tanggung jawab masing-masing instansi. Dengan begitu diharapkan tujuan kegiatan dapat benar-benar dicapai.

Pemkab Sleman secara konsisten dan bertahap terus meningkatkan kolaborasi-kolaborasi dengan pihak-pihak yang mempunyai tujuan yang sama untuk membangun Sleman menjadi lebih baik. Dengan semakin mantapnya koordinasi dan kolaborasi seluruh stakeholder di Sleman, terutama dalam pembangunan diharapkan dapat bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Sleman. Untuk itu saya mengajak, mari Sesarengan Mbangun Sleman. ■

Tidak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan kegiatan TMMD Regular yang telah berlangsung di Kabupaten Sleman selama ini telah mampu menggerakkan pembangunan infrastruktur di wilayah pedesaan. Pembangunan sarana prasarana pedesaan seperti poskamling, pasar, jalan dusun juga pemugaran rumah tidak layak huni, telah memberikan kontribusi positif dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat di Kabupaten Sleman.

Bagi Pemkab Sleman, penyelenggaraan TMMD selama ini dinilai mampu memberdayakan masyarakat, yang pada akhirnya bertujuan agar masyarakat sasaran mempunyai daya dan upaya untuk lepas dari masalah kemiskinan sekaligus memberdayakan diri untuk berdaya.

Dengan dukungan TMMD dalam berbagai pembangunan kegiatan fisik dan non fisik disertai partisipasi masyarakat, akan membantu menggerakkan dan memulihkan perekonomian masyarakat.

TMMD di Kabupaten Sleman dilaksanakan secara berpindah-pindah wilayah. Hal tersebut diharapkan dapat meratakan proses pembangunan di daerah-daerah yang belum banyak tersentuh program pemerintah. Evaluasi-evaluasi kegiatan kolaborasi antar instansi seperti TMMD tetap harus dilakukan.

Hal ini diperlukan untuk dapat meningkatkan kualitas maupun kuantitas kegiatan. Termasuk penentuan sasaran, pembagian tugas, beban, maupun tanggung jawab masing-masing instansi. Dengan begitu diharapkan tujuan kegiatan dapat benar-benar dicapai.

Pemkab Sleman secara konsisten dan bertahap terus meningkatkan kolaborasi-kolaborasi dengan pihak-pihak yang mempunyai tujuan yang sama untuk membangun Sleman menjadi lebih baik. Dengan semakin mantapnya koordinasi dan kolaborasi seluruh stakeholder di Sleman, terutama dalam pembangunan diharapkan dapat bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Sleman. Untuk itu saya mengajak, mari Sesarengan Mbangun Sleman. ■



DPRD KABUPATEN SLEMAN SUARA WAKIL RAKYAT

Jl. Parasama, Tridadi, Sleman, DIY Kode Pos 55511. Telp. (0274) 868413, Fax (0274) 868413

KINERJA KOMISI D DPRD KABUPATEN SLEMAN

Gerak Cepat Menekan Kesenjangan Sosial di Masyarakat



KR-Saifullah Nur Ichwan

M Arif Priyosusanto

SLEMAN (KR) - Indeks rasio gini atau ketimpangan orang kaya dengan orang miskin di Kabupaten Sleman tergolong cukup tinggi. Pemerintah daerah perlu gerak cepat (gercep) melakukan upaya untuk menekan kesenjangan sosial di masyarakat dengan program mengentaskan kemiskinan secara komprehensif dan merata.

Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Sleman M Arif Priyosusanto SSI mengatakan, indeks rasio gini yang

tinggi menunjukkan bahwa angka kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin di Kabupaten Sleman cukup jauh. Tentu ini menjadi tantangan tersendiri bagi eksekutif untuk menekan kesenjangan sosial ini.

"Kami mendorong pemerintah daerah melakukan upaya untuk menekan angka kesenjangan antara orang miskin dan orang kaya. Bagaimana program pengentasan kemiskinan ini dilakukan secara masif," kata Arif, Rabu (18/5).

Menurutnya, pemerintah daerah sebaiknya tidak hanya fokus pada pembangunan manusia di wilayah perkotaan saja. Namun pembangunan manusia juga perlu digalakkan di wilayah pedesaan.

"Program-program pembangunan di wilayah perkotaan cukup banyak. Seharusnya itu juga diimbangi dengan pembangunan manusia di pedesaan. Supaya pengetahuan dan ketrampilan masyarakat di perkotaan dan pedesaan merata," ucap anggota

Fraksi Gerindra ini. Di samping itu, eksekutif tidak hanya mendatangkan investor untuk wilayah perkotaan. Namun pemerintah daerah perlu mendatangkan investor ke wilayah pedesaan. Tujuannya untuk

meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan. "Dengan mendatangkan investor di pedesaan itu, diharapkan menekan angka pengangguran. Kemudian juga meningkatkan pembangunan dan ekonomi masyarakat," ucap warga Ma-

guwoharjo Depok Sleman ini.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Sleman M Zuhdan SPd MAP menambahkan, untuk menekan angka indeks rasio gini, salah satunya dengan meningkatkan produktivitas

masyarakat.

Agar produktivitas meningkat, pemerintah hadir untuk menjamin pendidikan dan kesehatan masyarakat.

"Pemerintah kan sudah menjamin kesehatan dan pendidikan masyarakat kurang mampu. Dengan adanya jaminan itu, masyarakat cukup fokus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya," katanya.

Untuk itu, Zuhdan meminta kepada eksekutif gercep melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai program Jaring Pengaman Sosial (JPS) maupun capai Universal Health Coverage (UHC). Harapannya masyarakat dapat mengakses program dari pemerintah daerah. "Masih banyak masyarakat yang belum tahu dengan program JPS.

Apalagi sekarang ini Sleman sudah meraih UHC. Dengan predikat UHC itu, ketika ada warga sakit serta secara faktual terdaftar sebagai warga bisa didaftarkan sebagai



KR-Istimewa

M Zuhdan

peserta KIS dan langsung bisa dipakai," jelasnya.

Kemudian, pemerintah juga perlu meningkatkan daya beli masyarakat. Mengingat sekarang ini daya beli masyarakat belum tinggi, meskipun kegiatan ekonomi sudah menggeliat.

"Memang sekarang sudah ramai di tempat wisata. Tentu ini akan berdampak pada PAD. Tapi daya beli masyarakat ke pelaku UMKM masih rendah," kata Zuhdan.

(Sni)-f



KR-Istimewa

M Arif Priyosusanto memimpin Komisi D saat kunjungan kerja di DPRD Kabupaten Boyolali.